



Berikan Kesempatan Kepada Anak-Anak Saat Ini



Anak-anak dalam pendidikan anak usia dini di Indonesia: dengan menginvestasikan lebih banyak uang untuk pendidikan, negara-negara akan lebih terbantu dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mereka (Foto: Ajun-Ally/Pacific Press/Newscom)

Oleh Vitor Gaspar dan Christine Lagarde

24 September 2018

Para pemimpin dunia berkumpul di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membahas bagaimana mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial dan lingkungan bagi semua—“Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan” dan 17 [Tujuan Pembangunan Berkelanjutan](#) (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Jalan panjang menuju pembangunan

Dunia telah mencapai banyak kemajuan dalam pembangunan selama kurun lima dekade terakhir. Sejak tahun 1990 saja, lebih dari satu miliar orang telah berhasil keluar dari kemiskinan ekstrem. Belum pernah sebelumnya dalam sejarah manusia

kita menyaksikan kemajuan dalam skala ini. Ini mencerminkan kombinasi antara reformasi ekonomi penting yang mengarah ke pertumbuhan ekonomi yang kuat di sebagian besar negara berkembang dan upaya bersama dari komunitas internasional untuk mendukung negara-negara dalam mencapai [Tujuan Pembangunan Milenium](#) (*Millenium Development Goals*) yang disepakati pada tahun 2000.

Mari kita lihat dua perempuan Indonesia: Sri sang nenek dan Tuti sang cucu. Penghasilan tahunan Sri adalah US\$1.500. Jika dia tidak meninggal saat melahirkan, maka dia pasti akan kehilangan satu dari tujuh anaknya sebelum usia satu tahun. Sebaliknya, Tuti memiliki penghasilan tahunan sebesar US\$11.200 dan hampir tidak berisiko meninggal saat melahirkan atau kehilangan anak.

Indonesia terus bergerak maju di sepanjang jalur pembangunannya. Pemerintah Indonesia terus melangkah dengan rencana untuk mendanai kebutuhan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang akan dibiayai dari peningkatan penerimaan pajak. Dengan meningkatkan pendapatan sebesar lima poin persentase dari PDB selama lima tahun, Indonesia dipastikan akan berada di jalur yang tepat untuk mencapai SDGs pada tahun 2030.

Namun banyak negara lain yang masih tertinggal. Di banyak bagian dunia, kemiskinan masih menjadi hambatan fundamental bagi kemajuan ekonomi. Misalnya, Benin. Seorang anak perempuan yang lahir di Benin hari ini memiliki harapan hidup yang sama dengan perempuan Indonesia yang lahir 40 tahun lalu. Benin memiliki penghasilan per kapita yang sama seperti yang dimiliki Indonesia pada waktu itu. Bahkan jika Benin akan meniru kemajuan pesat Indonesia, standar pembangunan yang tersedia bagi anak-anak perempuan Indonesia pada tahun 2030 baru akan dicapai oleh anak-anak Benin pada tahun 2050.

Tantangan besar

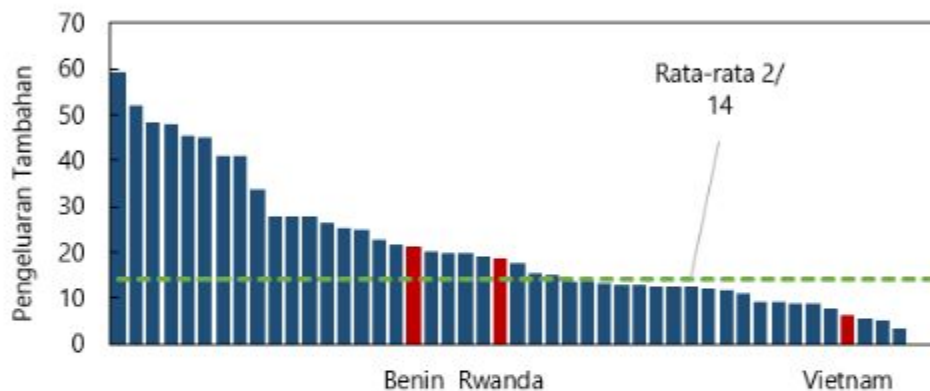
Ini tidak cukup baik. Tujuan dari SDGs adalah untuk memastikan bahwa semua anak, di mana pun mereka lahir, diberi kesempatan yang adil pada tahun 2030.

IMF telah melakukan beberapa pekerjaan analitis untuk melihat apa yang diperlukan negara-negara berkembang yang berpenghasilan rendah seperti Benin untuk mencapai SDGs. Kami melihat lima bidang yang sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif: pendidikan, kesehatan, air dan sanitasi, jalan, dan listrik—.

Berapa banyak lagi pengeluaran di bidang ini yang dibutuhkan untuk menempatkan negara-negara di jalur yang tepat untuk mencapai SDGs? Kami memperkirakan bahwa negara berkembang yang berpenghasilan rendah membutuhkan tambahan

pengeluaran tahunan sebesar rata-rata 14 poin persentase dari PDB (lihat grafik). Di 49 negara berkembang berpenghasilan rendah, kebutuhan pengeluaran tambahan berjumlah sekitar US\$520 miliar per tahun—perkiraan yang sama dengan lembaga lain. Tambahan pengeluaran yang signifikan jelas diperlukan.

Pengeluaran untuk mencapai tujuan 1/ Demi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mereka, sebagian besar negara berpenghasilan rendah perlu meningkatkan pengeluaran secara signifikan.



Sumber: Perkiraan staf IMF.

1/ Kebutuhan pengeluaran tambahan dalam pendidikan, kesehatan, listrik, jalan, air dan sanitasi. Benin, Rwanda, dan Vietnam adalah studi kasus di mana kebutuhan pengeluaran tambahan dibahas dengan otoritas negara dan mitra pembangunan.

2/ Rata-rata tertimbang PDB negara-negara berkembang berpenghasilan rendah.



INTERNATIONAL
MONETARY FUND

Mengatasi kebutuhan pengeluaran SDGs

Jadi bagaimana cara kita mengatasi tantangan yang sangat besar ini—yang penting bagi kesejahteraan seluruh generasi?

Kita semua perlu melakukan upaya bersama, yang paling penting adalah masing-masing negara, namun juga didukung oleh organisasi internasional, donor resmi dan filantrop, sektor swasta, serta masyarakat sipil.

Sebagai langkah pertama yang diperlukan, negara-negara berkembang berpenghasilan rendah harus memiliki tanggung jawab untuk mencapai SDGs. Upaya negara harus fokus pada penguatan manajemen ekonomi makro, meningkatkan kapasitas pajak, menanggulangi inefisiensi pengeluaran, mengatasi korupsi yang menghambat pertumbuhan inklusif, dan menumbuhkan lingkungan bisnis yang memungkinkan sektor swasta untuk maju. Tindakan pada area-area ini akan mendukung pertumbuhan yang fundamental bagi kemajuan SDGs—dan IMF akan bekerja sama dengan negara-negara anggotanya untuk secara aktif mendukung agenda reformasi ini.

Kedua, negara-negara ini memiliki ruang yang besar untuk menaikkan penerimaan pajak. Target yang ambisius namun realistis untuk banyak negara adalah meningkatkan rasio pajak sebesar 5 poin persentase dari PDB. Untuk mencapainya, diperlukan reformasi administrasi dan kebijakan yang kuat, di mana IMF dan mitra pembangunan lainnya dapat memainkan peran sebagai pendukung utama.

Upaya meningkatkan penerimaan pajak sejumlah ini mungkin cukup untuk memungkinkan pencapaian SDGs oleh negara pasar berkembang seperti Indonesia, tetapi jumlah tersebut tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan sebagian besar negara berkembang berpenghasilan rendah, termasuk Benin.

Untuk negara-negara berpenghasilan rendah, selain menggunakan sumber daya yang ada dengan lebih baik, dukungan keuangan juga dibutuhkan dari donor bilateral, lembaga keuangan internasional, filantrop, dan sektor swasta.

Para investor ini dapat memberikan kontribusi penting di sektor-sektor seperti infrastruktur dan energi bersih, jika reformasi untuk memperbaiki iklim bisnis dilakukan. Mendorong investasi swasta yang mendukung pembangunan nasional merupakan tujuan dari inisiatif-inisiatif seperti [*Compact with Africa*](#).

Pembiayaan ekstra juga dapat diperoleh dari pasar keuangan internasional dan pemberi pinjaman. Secara umum, meminjam dengan persyaratan komersial adalah pedang bermata dua jika dana tidak digunakan untuk proyek-proyek dengan pengembalian tinggi. Sebagaimana ditekankan oleh IMF dalam beberapa tahun terakhir, beban utang terus meningkat: IMF dan Bank Dunia kini menilai empat puluh persen negara berkembang berpenghasilan rendah berisiko tinggi mengalami tekanan utang atau berada dalam tekanan utang—tekanan utang yang akan secara signifikan mengganggu kegiatan ekonomi dan pertumbuhan lapangan kerja, sedangkan kemajuan menuju SDGs bergantung pada kedua hal tersebut.

Bantuan asing, sebaiknya dalam bentuk hibah, tetap penting dalam mendukung upaya pembangunan negara-negara miskin. Negara maju dapat berbuat lebih banyak, termasuk dengan bergerak mencapai target pemberian bantuan sebesar 0,7 persen dari pendapatan nasional bruto—dan juga dengan menargetkan anggaran bantuan mereka secara lebih baik untuk mendukung negara-negara yang paling membutuhkan bantuan tersebut. Banyak negara maju memiliki kondisi anggaran yang ketat, tetapi imbal balik ekonomi dari bantuan yang tepat sasaran—dalam hal pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan meningkatnya keamanan dan stabilitas—sangat tinggi.

Bukan hanya pengeluaran

Namun tantangan yang dihadapi melampaui peningkatan pengeluaran untuk pembangunan.

Contoh dari Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi saling menguatkan. Aspek penting dari tantangan yang lebih luas ini adalah lingkungan di mana semua negara berusaha menghasilkan dan mempertahankan pertumbuhan yang stabil. Untuk menciptakan lingkungan tersebut dibutuhkan berbagai produk publik global, termasuk stabilitas geopolitik, perdagangan terbuka, inisiatif iklim, dan tata pemerintahan yang baik, yang bergantung pada penanganan korupsi, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Landasan penting untuk pembangunan ini menggarisbawahi perlunya tindakan bersama oleh semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan SDGs.

Kofi Annan, yang kepergiannya baru-baru ini masih kita ratapi, pernah berkata: “*Kita memiliki sarana dan kapasitas untuk menangani masalah kita, jika saja kita dapat menemukan kemauan politisnya.*” Ini berlaku untuk seluruh agenda SDGs. Mari kita bangkitkan kemauan politis itu untuk memberi kesempatan kepada semua anak kita.



[Vitor Gaspar, seorang warga negara Portugal, adalah Direktur Departemen Urusan Fiskal IMF. Sebelum bergabung dengan IMF, ia memegang berbagai posisi kebijakan senior di Banco de Portugal, termasuk yang terakhir sebagai Penasihat Khusus. Ia menjabat sebagai Menteri Negara dan Keuangan Portugal pada periode 2011–2013. Ia adalah kepala Biro Komisi Eropa untuk Penasihat Kebijakan Eropa pada periode 2007-2010, dan Direktur Jenderal penelitian di Bank Sentral Eropa dari tahun 1998 hingga 2004. Ia memegang gelar PhD dan pascadoktoral di bidang Ekonomi dari Universidade Nova de Lisboa. Ia juga pernah belajar di Universidade Católica Portuguesa.](#)



Christine Lagarde adalah Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF). Setelah menjalani lima tahun masa jabatan pertamanya, ia diangkat kembali pada Juli 2016 untuk masa jabatan kedua. Sebagai warga negara Perancis, ia sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan Perancis pada periode Juni 2007 hingga Juli 2011, dan juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara Prancis untuk Perdagangan Luar Negeri selama dua tahun.

Ia juga memiliki karier yang ekstensif dan signifikan sebagai pengacara *anti-trust* dan tenaga kerja, dengan menjabat sebagai mitra di firma hukum internasional Baker & McKenzie. Di firma itu pula, para mitra memilihnya sebagai ketua pada Oktober 1999. Ia memegang jabatan teratas di Baker & McKenzie sampai Juni 2005 ketika ia ditunjuk untuk menduduki jabatan menteri pertamanya di Perancis. Ia memiliki gelar dari Institute of Political Sciences (IEP) dan dari Law School of Paris X University, tempat ia juga mengajar sebelum bergabung dengan Baker & McKenzie pada tahun 1981.

Tautan terkait:

5 Hal yang Perlu Anda Ketahui Tentang IMF dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

Meningkatnya Utang Mengancam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Pembiayaan untuk Pembangunan Berkelanjutan: Uang dan Kebijakan yang Tepat